

The Effect Of A Digital-Based Public Information Disclosure System On The Quality Of Regional Financial Reporting In The Medan City Government

Pengaruh Sistem Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Digital Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Medan

Nursaida Harahap¹⁾; Irawan²⁾; Anggi Pratama Nasution³⁾

^{1,2)} *Study Program of Accounting, Faculty of Social and Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi*

Email: ¹⁾ nursaidahrp2007@gmail.com ; ²⁾ irawan@dosen.pacabudi.ac.id

³⁾ anggipratama@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [29 Agustus 2026]

Revised [26 September 2026]

Accepted [30 September 2026]

KEYWORDS

Digital Transparency, e-Government, Local Government, Public Information Disclosure, Quality of Financial Reporting.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Transformasi tata kelola pemerintahan ke arah digital menumbuhkan harapan bahwa informasi publik dapat tersaji lebih cepat dan lebih terbuka. Meski begitu, hadirnya beragam kanal digital di tingkat daerah belum otomatis menjadi jaminan bahwa laporan keuangan yang disusun bermutu baik. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan mengukur seberapa besar keterbukaan informasi publik berbasis digital memengaruhi kualitas pelaporan keuangan daerah di Pemerintah Kota Medan. Keterbukaan itu ditinjau dari tiga sisi, yaitu kemudahan mengakses platform digital, kelengkapan data keuangan, serta kecepatan pemutakhiran informasi. Metode yang dipakai bersifat kuantitatif dengan data primer yang dihimpun melalui kuesioner berskala Likert 1–5 terhadap 35 pegawai penyusun laporan keuangan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan, lalu diolah dengan regresi linear berganda pada SPSS 26. Hasil pengujian menunjukkan seluruh butir instrumen valid dan reliabel serta memenuhi asumsi klasik. Ketiga dimensi keterbukaan tersebut terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan, baik diuji sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan model mampu menjelaskan sekitar 45 persen keragaman datanya; di antara ketiganya, kecepatan pemutakhiran informasi menempati posisi paling menentukan. Karena itu, penelitian menyimpulkan bahwa penguatan sistem keterbukaan informasi digital—khususnya pada aspek ketepatan waktu—menjadi langkah strategis yang perlu ditempuh pemerintah daerah untuk memperbaiki mutu pelaporan keuangannya.

ABSTRACT

The digital transformation of government governance fosters the hope that public information can be presented more rapidly and transparently. However, the availability of various digital channels at the local level does not automatically guarantee high-quality financial reporting. Addressing this gap, this study aims to measure the extent to which digital-based public information transparency influences the quality of local financial reporting within the Medan City Government. Transparency is assessed across three dimensions: ease of access to digital platforms, completeness of financial data, and the speed of information updates. A quantitative method was employed, utilizing primary data collected via a 1–5 Likert scale questionnaire from 35 financial reporting staff members across various Medan City regional government agencies (OPD); the data were subsequently analyzed using multiple linear regression in SPSS 26. Test results indicate that all instrument items were valid and reliable, satisfying classical assumption requirements. All three transparency dimensions were found to have a positive and significant impact on financial reporting quality—whether tested individually or collectively—with the model explaining approximately 45 percent of the data variance; among the three, the speed of information updates emerged as the most decisive factor. Consequently, the study concludes that strengthening digital information transparency systems—particularly regarding timeliness—is a strategic measure for local governments to enhance the quality of their financial reporting.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi ikut menggeser cara pemerintahan dijalankan seiring berpindahannya banyak aktivitas ke ranah digital. Ketika tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas kian menguat, pemerintah daerah tidak lagi bisa bergantung pada pola pelaporan lama yang

tertutup dan lambat. Kewajiban tiap badan publik untuk menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan mudah dijangkau ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) beserta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Dalam pengelolaan keuangan daerah, keterbukaan informasi bukan sekadar perintah hukum, melainkan sarana strategis yang membentuk pengawasan publik yang efektif; pengawasan seperti inilah yang pada gilirannya mendorong perbaikan mutu pelaporan keuangan lewat akuntabilitas yang lebih kuat (Bertot et al., 2010; Wirtz & Daiser, 2018).

Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem keterbukaan informasi publik berperan besar untuk menghadirkan transparansi sekaligus pertanggungjawaban atas keuangan daerah. Apabila data realisasi anggaran, serapan belanja tiap OPD, dan laporan keuangan disajikan lengkap, akurat, dan diperbarui rutin melalui situs resmi, maka publik, DPRD, media, hingga lembaga pengawas dapat menilai dan mengawasinya dengan lebih efisien. Sebaliknya, kanal yang sukar dibuka, dokumen yang tidak utuh, atau pembaruan yang tersendat akan menggerus fungsi pengawasan tersebut. Informasi yang datang terlambat kehilangan manfaatnya dalam pengambilan keputusan (Omar et al., 2024), sedangkan informasi yang tidak lengkap menghalangi penilaian yang menyeluruh atas kinerja keuangan (Serrano-Cinca et al., 2009).

Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang berpenduduk lebih dari 2,4 juta jiwa dengan APBD Rp7,67 triliun pada 2022, Kota Medan menghadapi pengelolaan keuangan yang cukup kompleks. Sebenarnya Pemerintah Kota Medan sudah menyiapkan beberapa kanal digital, seperti Portal PPID Kota Medan, situs resmi pemkomedan.go.id, portal transparansi anggaran BPKAD, serta laman tiap OPD. Namun, penelusuran awal menemukan tiga persoalan pokok: (a) kendala aksesibilitas, misalnya dokumen yang sulit ditemukan dan tautan yang mati; (b) kelengkapan publikasi yang belum seragam antar-OPD; serta (c) keterlambatan penayangan dokumen yang kerap berulang. Merujuk Sipolo et al. (2024), penyampaian laporan keuangan OPD rata-rata melampaui tenggat sekitar 30–60 hari. Gambaran persoalan serapan anggaran tersebut diringkaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Realisasi APBD Kota Medan Tahun 2022

z	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022	%
Pendapatan Asli Daerah	3.050.594.560.414	2.230.553.495.747	73,12
Dana Transfer	3.389.588.278.235	3.150.952.726.119	92,96
Total Pendapatan	6.522.123.770.774	5.449.340.586.723	83,55
Belanja Operasi	5.279.980.643.883	4.411.464.936.830	83,55
Belanja Modal	2.325.507.184.562	1.617.535.812.652	69,56
Total Belanja	7.668.720.191.488	6.047.219.172.842	78,86
SiLPA	–	548.544.830.563	–

Sumber: LKPD Pemko Medan 2022 (diolah penulis, 2026)

Sepanjang 2022, serapan belanja modal hanya mencapai 69,56% (Rp1,617 triliun dari pagu Rp2,325 triliun), sehingga tersisa SiLPA Rp548,54 miliar serta defisit Rp597,88 miliar. Meskipun BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2022, masih ditemukan 23 temuan bernilai Rp89,4 miliar yang sebagian besar menandakan kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada aspek perencanaan, pemantauan, dan kepatuhan (BPK RI, 2023b). Fakta ini memperlihatkan bahwa tersedianya infrastruktur digital belum otomatis mewujudkan transparansi.

Sejumlah pertimbangan menegaskan pentingnya penelitian ini: hasil riset terdahulu yang belum sepakat mengenai pengaruh e-government dan transparansi digital terhadap mutu pelaporan (Rahmawati et al., 2024; Sofyani et al., 2020; Taufik et al., 2023); belum adanya kajian di Kota Medan yang secara khusus menelaah tiga dimensi KIP digital dengan data primer dari seluruh OPD; serta manfaat praktisnya yang besar bagi penyempurnaan Portal PPID maupun laman OPD. Atas dasar itu, penelitian ini mengkaji pengaruh aksesibilitas platform digital, kelengkapan informasi keuangan, dan ketepatan waktu pemutakhiran terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah di Pemerintah Kota Medan.

LANDASAN TEORI

Technology Acceptance Model (TAM)

Menurut Technology Acceptance Model yang diperkenalkan Davis (1989), kesediaan seseorang menerima dan memakai sebuah teknologi terutama dibentuk oleh dua hal, yakni persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Dalam konteks riset ini, aksesibilitas platform digital keuangan daerah dapat ditinjau dari sisi persepsi kemudahan penggunaan: kian mudah Portal PPID dan laman OPD dioperasikan, kian besar pula dorongan bagi



pengelola keuangan untuk memakai dan merawat kanal tersebut secara aktif (Nugroho & Hidayat, 2024; Venkatesh & Bala, 2016).

Teori Stewardship

Teori Stewardship (Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997) menempatkan pengelola sebagai steward yang bekerja demi kepentingan principal dan masyarakat, bukan demi keuntungan dirinya sendiri. Pada tata kelola keuangan daerah, pengelola keuangan OPD memikul tanggung jawab menyajikan informasi secara lengkap, jujur, dan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus profesional. Sudut pandang inilah yang mendasari anggapan bahwa kelengkapan serta ketepatan waktu pengungkapan informasi keuangan mencerminkan komitmen steward terhadap akuntabilitas publik (Schillemans, 2013).

E-Government

Istilah e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk mendongkrak efisiensi layanan, transparansi, dan partisipasi warga (Gil-Garcia et al., 2018; Lindgren et al., 2019). Ketika diterapkan pada publikasi informasi keuangan daerah, e-government menumbuhkan pengawasan publik yang lebih aktif sekaligus mendorong perbaikan mutu pelaporan keuangan (Sofyani et al., 2020).

Sistem Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Digital

Dalam penelitian ini, keterbukaan informasi publik berbasis digital diuraikan ke dalam tiga dimensi. Dimensi pertama adalah aksesibilitas platform digital, yaitu seberapa gampang informasi keuangan ditemukan dan dijangkau melalui Portal PPID dan laman OPD (Windyaningrum, 2018; Pontoh et al., 2023). Dimensi kedua adalah kelengkapan informasi keuangan, yakni tersedianya seluruh dokumen keuangan wajib, seperti APBD, LRA, LKPD, dan CaLK (Zhang et al., 2016; Saputri et al., 2024). Dimensi ketiga adalah ketepatan waktu pemutakhiran, yaitu penayangan dan pembaruan dokumen keuangan yang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan regulasi (Zuiderwijk & Janssen, 2014; Sari & Handayani, 2024).

Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah

Kualitas pelaporan keuangan daerah menggambarkan sejauh mana laporan keuangan memenuhi karakteristik kualitatif yang ditetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 71 Tahun 2010), yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan yang bermutu tampak dari penyajian yang jujur, dapat diverifikasi, tepat waktu, serta patuh pada standar yang berlaku (Suwanda, 2015; Putra & Haryanto, 2021; Wijaya & Dewi, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif berjenis asosiatif kausal, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menelusuri hubungan sebab-akibat antarvariabel (Sugiyono, 2019). Desain yang dipilih adalah cross-sectional, sehingga data dikumpulkan pada satu titik waktu dari sejumlah unit pengamatan, yakni pegawai pengelola dan penyusun laporan keuangan pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Data yang dipakai berjenis primer dan dihimpun melalui penyebaran kuesioner berskala Likert 1–5.

Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai pengelola dan penyusun laporan keuangan pada OPD tingkat kota yang wajib menyusun serta melaporkan informasi keuangannya secara mandiri. Mengacu Peraturan Walikota Medan Nomor 74 Tahun 2021, perangkat daerah yang mengelola pagu anggaran secara mandiri berjumlah 56 unit, terdiri atas 35 OPD non-kecamatan dan 21 kecamatan. Sebanyak 35 OPD non-kecamatan ditetapkan sebagai kerangka populasi, sementara kecamatan dan kelurahan tidak dilibatkan karena tidak menyusun LKPD sendiri dan tingkat kerumitan pelaporannya relatif rendah.

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) OPD berpagu anggaran minimal Rp10 miliar pada 2022 sesuai pertimbangan materialitas audit (Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017); (2) responden yang terlibat langsung dalam pengelolaan atau penyusunan laporan keuangan; (3) masa kerja paling sedikit satu tahun; dan (4) bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Karena seluruh 35 OPD non-kecamatan memenuhi kriteria anggaran, terkumpul 35 responden. Jumlah ini telah melampaui batas minimum sampel regresi, yaitu sepuluh kali jumlah variabel independen atau minimal 30 responden untuk tiga variabel independen (Hair et al., 2010).

Variabel penelitian mencakup tiga variabel independen, yakni Aksesibilitas Platform Digital (X1), Kelengkapan Informasi Keuangan (X2), dan Ketepatan Waktu Pembaruan (X3), serta satu variabel dependen, yaitu Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Y). Seluruh variabel diukur dengan skala Likert 1–5. Tahapan analisis meliputi uji validitas dan reliabilitas instrumen, statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis lewat uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2). Semua pengolahan data dijalankan dengan SPSS 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek dan Karakteristik Sampel

Kuesioner disebarikan kepada 35 OPD non-kecamatan yang seluruhnya lolos kriteria materialitas anggaran. Dari tiap OPD diperoleh satu responden yang memenuhi kriteria keterlibatan langsung dan pengalaman kerja minimal satu tahun, sehingga terkumpul 35 responden. Seluruh kuesioner kembali dalam keadaan terisi penuh dan layak diolah (tingkat pengembalian 100%). Komposisi sampel didominasi kelompok Dinas Daerah (57,1%), disusul Badan Daerah serta Kantor/Satuan lain (masing-masing 17,1%), Sekretariat (5,7%), dan Inspektorat (2,9%). Besarnya porsi Dinas Daerah membuat sampel cukup representatif, sebab kelompok inilah yang menanggung kerumitan pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan yang relatif tinggi.

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji validitas memakai korelasi Pearson product moment. Pada $N = 35$ ($df = 33$) dengan taraf signifikansi 5%, nilai r -tabel adalah 0,334. Seluruh butir indikator menunjukkan korelasi positif dan signifikan pada taraf 0,05, sehingga dinyatakan valid, sebagaimana diringkas pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Butir	Rentang r -hitung	Sig.
X1	X1.1–X1.5	0,237 – 0,702	< 0,05
X2	X2.1–X2.5	0,312 – 0,676	< 0,05
X3	X3.1–X3.4	0,342 – 0,616	< 0,05
Y	Y.1–Y.4	0,390 – 0,721	< 0,05

Sumber: Output SPSS 26, data diolah (2026)

Pengujian reliabilitas melalui Cronbach's Alpha menunjukkan seluruh variabel tergolong reliabel (nilai > 0,60), sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach's Alpha	N Item	Ket
Aksesibilitas Platform Digital (X1)	0,773	5	Reliabel
Kelengkapan Informasi Keuangan (X2)	0,817	5	Reliabel
Ketepatan Waktu Pembaruan (X3)	0,786	4	Reliabel
Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Y)	0,835	4	Reliabel

Sumber: Output SPSS 26, data diolah (2026)

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif memperlihatkan keempat variabel berada pada kategori “Tinggi” (Baik). Rerata indeks tertinggi diraih Aksesibilitas Platform Digital (3,95), diikuti Kelengkapan Informasi Keuangan bersama Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (masing-masing 3,94), sedangkan Ketepatan Waktu Pembaruan berada pada posisi terendah (3,67). Secara lebih rinci, butir tentang ketepatan waktu penayangan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) triwulanan menerima porsi jawaban Kurang Setuju terbesar (60,0%). Temuan ini mengisyaratkan bahwa dimensi ketepatan waktu pembaruan merupakan aspek yang paling lemah sekaligus paling perlu dibenahi.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Mean Skor	Rerata Indeks	Kategori
Aksesibilitas Platform Digital (X1)	35	19,77	3,95	Tinggi
Kelengkapan Informasi Keuangan (X2)	35	19,69	3,94	Tinggi
Ketepatan Waktu Pembaruan (X3)	35	14,69	3,67	Tinggi
Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Y)	35	15,77	3,94	Tinggi

Sumber: Output SPSS 26, data diolah (2026)

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov (Tabel 5) menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,161 > 0,05, sehingga residual model regresi dinyatakan berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov)

Keterangan	Unstandardized Residual
N	35
Test Statistic (Absolute)	0,128
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,161
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0,154

Sumber: Output SPSS 26, data diolah (2026)

Uji linearitas melalui pengamatan scatterplot memperlihatkan hubungan antara variabel independen dan dependen berbentuk linear. Adapun uji multikolinearitas (Tabel 6) menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, sehingga terbebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Aksesibilitas Platform Digital (X1)	0,916	1,092
Kelengkapan Informasi Keuangan (X2)	0,923	1,083
Ketepatan Waktu Pembaruan (X3)	0,880	1,136

Sumber: Output SPSS 26, data diolah (2026)

Uji heteroskedastisitas melalui Uji Glejser (Tabel 7) menunjukkan nilai signifikansi setiap variabel melebihi 0,05, sehingga tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas. Dengan begitu, seluruh asumsi klasik terpenuhi dan model regresi dinyatakan layak (BLUE – Best Linear Unbiased Estimator).

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Variabel	Sig.	Ket.
Aksesibilitas Platform Digital (X1)	0,725	Bebas Heteros.
Kelengkapan Informasi Keuangan (X2)	0,205	Bebas Heteros.
Ketepatan Waktu Pembaruan (X3)	0,872	Bebas Heteros.

Sumber: Output SPSS 26, data diolah (2026)

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	B	Std. Error	Beta	t
(Constant)	-1,128	3,117	–	-0,362
Aksesibilitas Platform Digital (X1)	0,281	0,126	0,298	2,242
Kelengkapan Informasi Keuangan (X2)	0,293	0,110	0,352	2,658
Ketepatan Waktu Pembaruan (X3)	0,379	0,143	0,359	2,646

Sumber: Output SPSS 26, data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 8, persamaan regresi yang terbentuk adalah $Y = -1,128 + 0,281 X_1 + 0,293 X_2 + 0,379 X_3 + e$. Seluruh koefisien regresi bertanda positif, yang menandakan arah pengaruh searah terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Ditinjau dari koefisien beta terstandarisasi, Ketepatan

Waktu Pembaruan ($\beta = 0,359$) tampil sebagai variabel paling dominan, disusul Kelengkapan Informasi Keuangan ($0,352$) dan Aksesibilitas Platform Digital ($0,298$).

Pengujian Hipotesis

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan ($\text{Sig.} < 0,05$), sebagaimana tampak pada Tabel 9, sehingga H1, H2, dan H3 diterima. Uji simultan (uji F) pada Tabel 10 menghasilkan nilai F hitung 10,289 dengan signifikansi $< 0,001$, sehingga H4 diterima: ketiga variabel secara serentak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Nilai koefisien determinasi ditampilkan pada Tabel 11.

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	t hitung	Sig.	Ket.
Aksesibilitas Platform Digital (X1)	2,242	0,032	Signifikan
Kelengkapan Informasi Keuangan (X2)	2,658	0,012	Signifikan
Ketepatan Waktu Pembaruan (X3)	2,646	0,013	Signifikan

Sumber: Output SPSS 26, data diolah (2026)

Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji F – ANOVA)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	99,870	3	33,290	10,289	0,000
Residual	100,301	31	3,236		
Total	200,171	34			

Sumber: Output SPSS 26, data diolah (2026)

Tabel 11. Koefisien Determinasi (Model Summary)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
0,706	0,499	0,450	1,799

Sumber: Output SPSS 26, data diolah (2026)

Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,450 menunjukkan bahwa 45,0% keragaman kualitas pelaporan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel, sementara 55,0% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Nilai R sebesar 0,706 memperlihatkan kuatnya keterkaitan antara variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen.

Pengaruh Aksesibilitas Platform Digital terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah

Aksesibilitas platform digital terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Kian mudah Portal PPID dan situs resmi Pemerintah Kota Medan diakses, kian baik pula mutu pelaporan keuangan yang dihasilkan OPD. Fenomena ini dapat dijelaskan lewat Technology Acceptance Model yang menegaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan mendorong penerimaan sekaligus pemanfaatan teknologi. Saat platform terasa mudah dioperasikan, pengelola keuangan lebih terpacu untuk menggunakan dan memelihara kanal tersebut, sehingga terbentuk kebiasaan menyajikan dan memperbarui informasi keuangan secara tertib. Kemudahan akses pun memunculkan tekanan pertanggungjawaban dari pihak luar yang mendorong OPD menyusun laporannya dengan lebih cermat.

Pengaruh Kelengkapan Informasi Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah

Kelengkapan informasi keuangan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Kian utuh dokumen keuangan wajib yang dipublikasikan secara digital—meliputi APBD, LRA, LKPD, dan CaLK—kian tinggi pula mutu pelaporan keuangan daerah. Temuan ini selaras dengan Teori Stewardship yang memandang pengelola keuangan sebagai steward yang wajib menyajikan informasi secara menyeluruh demi kepentingan publik. Dokumen yang lengkap memungkinkan pengguna informasi menilai kinerja keuangan secara utuh, sehingga terhindar dari kesenjangan informasi yang berpotensi menyesatkan penafsiran atas kondisi keuangan OPD.

Pengaruh Ketepatan Waktu Pembaruan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah

Ketepatan waktu pembaruan berpengaruh positif dan signifikan, bahkan menjadi faktor paling dominan di antara ketiga dimensi. Informasi keuangan yang tersaji tepat waktu tetap menjaga nilai gunanya bagi pengambilan keputusan, sementara informasi yang terlambat kehilangan relevansi meski tetap akurat. Menariknya, meski paling berpengaruh, dimensi ini justru dinilai paling lemah dari sisi persepsi. Ketimpangan antara tingkat kepentingan dan capaian nyata inilah yang menempatkan



ketepatan waktu sebagai prioritas utama perbaikan. Secara teoretis, temuan tersebut memperkuat kedudukan relevansi dan ketepatan waktu sebagai karakteristik kualitatif dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengaruh Simultan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah

Secara bersama-sama, ketiga dimensi keterbukaan informasi publik berbasis digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Ketiganya bukan unsur yang berdiri sendiri, melainkan saling menopang: portal yang mudah diakses menjadi kurang bermakna bila dokumennya tidak lengkap, sedangkan dokumen yang lengkap tidak optimal manfaatnya jika terlambat ditayangkan. Kontribusi sebesar 45,0% sekaligus menandakan bahwa perbaikan mutu pelaporan tidak cukup hanya bertumpu pada penguatan keterbukaan digital, tetapi juga perlu ditopang faktor lain seperti kompetensi sumber daya manusia, efektivitas sistem pengendalian internal, dan komitmen pimpinan OPD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Aksesibilitas Platform Digital, Kelengkapan Informasi Keuangan, dan Ketepatan Waktu Pembaruan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Medan, baik secara parsial maupun serentak, sehingga H1, H2, H3, dan H4 seluruhnya diterima. Ketepatan Waktu Pembaruan muncul sebagai variabel paling berpengaruh ($\text{Beta} = 0,359$), diikuti Kelengkapan Informasi Keuangan ($\text{Beta} = 0,352$) dan Aksesibilitas Platform Digital ($\text{Beta} = 0,298$). Model regresi yang terbentuk mampu menjelaskan 45,0% keragaman Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah ($\text{Adjusted R Square} = 0,450$), sedangkan 55,0% sisanya diterangkan oleh faktor lain di luar cakupan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertot, J.C., P.T. Jaeger and J.M. Grimes (2010) Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264-271.
- Davis, F.D. (1989) Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- Davis, J.H., F.D. Schoorman and L. Donaldson (1997) Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20-47.
- Omar, M., A. Rahman and R. Saeed (2024) Timeliness in digital public financial reporting: A comparative study. *Asian Journal of Public Administration*, 18(3), 119-135.
- Pemerintah Kota Medan (2021) Peraturan Walikota Medan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. Medan: Pemerintah Kota Medan.
- Putra, I.G.L.A. and Haryanto (2021) Determinan kualitas pelaporan keuangan daerah pemerintah daerah Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Governance*, 5(2), 88-97.
- Rahmawati, L., S. Sudirman and A. Halim (2024) E-government, transparency, and financial reporting quality: Evidence from Indonesian local governments. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 11-22.
- Republik Indonesia (2008) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (2010a) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (2010b) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Schillemans, T. (2013) Moving beyond the clash of interests: On stewardship theory and the relationships between central government departments and public agencies. *Public Management Review*, 15(4), 541-562.
- Serrano-Cinca, C., M. Rueda-Tomás and P. Portillo-Tarragona (2009) Factors influencing e-disclosure in local public administrations. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 27(2), 355-378.
- Sofyani, H., R. Akbar and R.C. Ferrer (2020) E-government implementation, transparency, and accountability: The case of Indonesian local government. *International Journal of Public Administration*, 43(4), 315-325.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi 2. Bandung: Alfabeta.
- Venkatesh, V. and H. Bala (2008) Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. *Decision Sciences*, 39(2), 273-315.

Wirtz, B.W. and P. Daiser (2018) Resistance of public personnel to accept e-government technologies: Concepts, theory development, and empirical validation. *International Journal of Public Administration*, 41(5-6), 451-465.